



**RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN GUMELAR
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN GUMELAR**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional dan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa setiap daerah wajib menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, yang salah satunya berupa Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dipakai sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Muatan Rencana Kerja Anggaran meliputi input dana, tenaga kerja, fasilitas, dll. Kegiatan (proses) dan **output/ outcome**. Sehingga perencanaan di mulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah Pembangunan Daerah. **Critical pointnya** adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan **output/ outcome**.

Rencana Kerja Kecamatan Gumelar Tahun 2020 di susun dengan menggunakan pendekatan perencanaan teknokratis (strategis berbasis kinerja), dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang merupakan suatu proses pemikiran strategis yang tercermin dari a) Evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu b) Rumusan status kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini, c) Rumusan peluang dan tantangan kedepan yang mempengaruhi penyusunan Rencana kerja, d) Rumusan tujuan ,strategi dan kebijakan pembangunan , e) Pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana, f) Rumusan dan prioritas program dan kegiatan berbasis kinerja, g) Tolak ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan, h) Prakiraan maju pendanaan untuk tahun berikutnya, i) Kejelasan siapa yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian,, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran.

Melalui pendekatan ini rencana yang di susun mencerminkan kerangka berfikir yang komprehensif dan terpadu, serta dapat di pertanggung jawabkan secara akademis.

Pendekatan demokratis dan partisipatif di wujudkan melalui :

- a) Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan.
- b) Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan non pemerintah,
- c) Keterwakilan yang memadai dari seluruh *segmen masyarakat terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal*,
- d) Berperan aktif pada pelaksanaan Muarenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah dari segi penerapan perencanaan partisipatif,
- e) Konsekuensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan aeperti perumusan isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan serta prioritas program

Pendekatan politis, penyusunan Rencana kerja satuan kerja perangkat Daerah mengacu pada Rencana kerja pembangunan Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan bentuk konsekwensi politis antara Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Pendekatan ini juga tercermin pada keterlibatan aktif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam musrenbang Kecamatan dan Kabupaten termasuk hasil sinergitas hasil jaring aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian dokumen Rencana kerja Pembangunan Daerah sebagai peraturan Bupati mengikat semua pihak untuk menjadikan dokumen ini sebagai acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan sampai Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pendekatan Top Down, Perencanaan di laksanakan menurut jenjang pemerintah yang kemudian diselaraskan melalui rapat koordinasi dan musrenbag mulai tingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten juga tujuan global Millenium Development Goals. Pendekatan ini tercermin pada : a) Sinergi dengan program prioritas nasional dan daerah, b) Konsisten pada Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana kerja pembangunan Daerah dan Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Konsisten dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, c) Penanganan masalah dengan pendekatan holistic dan pendekatan sistem.

Pendekatan Bottom-up, perencanaan di laksanakan secara berjenjang dan diselaraskan melalui musrenbang, konsisten terhadap visi misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta kesepakatan masyarakat tentang prioritas pembangunan dan hasil forum Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja ini di sesuaikan dengan perartura menteri dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, penendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja ini memuat kerangka pendanaan dengan mendorong partisipasi masyarakat

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam menyusun Rencana kerja Kecamatan Gumelar Tahun 2018 mengacu pada peraturan perundang-Undangan yang berlaku, yaitu : a) Landasan idiil Pancasila, b) Landasan konstitusional Undang-Undang dasar 1945, serta, c) Landasan operasional yang antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029

- (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009, Nomor 4 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011, Nomor 3 Seri E).
26. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas
27. Perda Kab. Banyumas No. 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran daerah kabupaten banyumas Tahun 2016 nomor 1 Seri D)
28. Peraturan Bupati Banyumas No. 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Banyumas

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

1. Menjabarkan arahan Rencana Strategis Kecamatan Gumelar Tahun 2018 – 2023
2. Mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan pembangunan
3. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020

b. Tujuan

1. Mensinkronisasikan dan Mensenergikan program dan kegiatan Kecamatan Gumelar Tahun 2019 dengan target dan Sasaran Pembangunan Daerah Sebagaimana Terumus dalam dokumen

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020

2. Memberikan arah sekaligus tolak ukur pelaksanaan pembangunan
3. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kecamatan Gumelar Tahun 2020
4. Mewujudkan Sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Gumelar Tahun 2019,

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Gumelar Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Gumelar
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Gumelar
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Gumelar
- 2.4 Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Daerah
- 3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Gumelar
- 3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Rancangan awal renja

Bab IV Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
KECAMATAN GUMELAR TAHUN 2021

**2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN GUMELAR
TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN
GUMELAR**

Pelaksanaan Renja Kecamatan Gumelar tahun 2021 mengacu pada tugas dan fungsi kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang di berikan oleh Bupati kepada kecamatan. Tugas pokok kecamatan berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan DAN Kelurahan di Kabupaten Banyumas .

Adapun fungsi dari Kecamatan Gumelar adalah :

1. Perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
2. Pelaksan koordinasi kebijakan di bidang pemerintah, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintah, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
4. Pelaksanaan pembinaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serata kelurahan;
6. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum;
7. Pelaksanaan fungsi kesektariat kecamatan;
8. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Renja Kecamatan Gumelar tahun 2021 merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Gumelar, di mana penyusunannya merujuk pada tujuan

dan sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas 2013-2018 Adapun pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Gumelar antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , meliputi kegiatan :

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor
 - a. Belanja telepon
 - b. Belanja listrik
 - c. Belanja internet
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - a. Belanja alat tulis kantor
 - b. Belanja alat listrik dan elektronik
 - c. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
 - d. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
 - e. Belanja BBM
 - f. Belanja pengisian tabung gas
 - g. Belanja surat kabar/majalah
 - h. Belanja cetak
 - i. Belanja penggandaan
 - j. Belanja makanan dan minuman harian pegawai
 - k. Belanja makanan dan minuman rapat
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - a. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
 - b. Belanja perjalanan dinas luar daerah
- Penyediaan Tenaga Administrasi, Keamanan, Pengemudi dan Kebersihan
 - a. Belanja jasa supir/kebersihan/keamanan/administrasi/jasa keperluan kantor lainnya yang sejenis
- Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah
 - a. Honorarium pengelola keuangan pada SKPD
 - b. Uang lembur PNS

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - a. Belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan Mebelair
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin – Pengadaan Alat Pembersih
 - c. Belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan Alat Dapur
 - d. Belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan Alat Rumah Tangga

- e. Belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan Alat Pemadam
- f. Belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan Peralatan Mini Komputer
- g. Belanja modal Aset Tetap Lainnya – pengadaan Alat Olah Raga Lainnya
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - a. Belanja bahan baku bangunan
 - b. Belanja jasa supir/kebersihan/keamanan/jasa keperluan kantor lainnya yang sejenis
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - a. Belanja jasa service
 - b. Belanja penggantian suku cadang
 - c. Belanja surat tanda nomor kendaraan
- Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - a. Belanja pemeliharaan aset tetap – peralatan dan mesin
- 3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan
 - a. Belanja alat tulis kantor
 - b. Belanja penggandaan
 - c. Belanja makanan dan minuman rapat
 - d. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- 4. Program Peningkatan Pelayan Publik
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
 - a. Belanja alat tulis kantor
 - b. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
 - c. Belanja bahan bakar minyak/gas
 - d. Belanja bendera/umbul-umbul/layur
 - e. Belanja jasa dokumentasi dan dekorasi
 - f. Belanja cetak
 - g. Belanja penggandaan
 - h. Belanja sewa pakaian adat/tradisional
 - i. Belanja makanan dan minuman rapat
 - j. Belanja makanan dan minuman tamu
 - k. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
 - l. Belanja perjalanan dinas luar daerah

- Fasilitas Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan
 - a. Belanja alat tulis kantor
 - b. Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi
 - c. Belanja penggandaan
 - d. Belanja makanan dan minuman rapat
 - e. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- Fasilitas Perencanaan dan Pembangunan Desa
 - a. Belanja alat tulis kantor
 - b. Belanja jasa dokumentasi dan dekorasi
 - c. Belanja penggandaan
 - d. Belanja makanan dan minuman rapat
 - e. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Gumelar

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Gumelar berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM , maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang diterapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Gumelar dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran -
- Meningkatnya Sarana dan Prasarana aparatur
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

Sesuai dengan tugas dan fungsinya , maka Kecamatan Gumelar memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya
2. Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat desa, dusun atau lingkungan sampai pada RT dan RW
3. Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa untuk melihat langsung aktifitas masyarakat dan bersiskamling
4. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di seluruh desa bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait
5. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa
6. Pembinaan Penambangan Galian C
7. Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas rayon di desa
8. Mengadakan pekan panutan PBB di desa
9. Penataan ruang pelayanan publik di kecamatan (satu) pintu
10. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan Desa Kecamatan Gumelar
11. Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin
12. Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari Senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan , UPT
13. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya
14. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan

15. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Gumelar
16. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa
17. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat APBDes , dan Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa
18. Mengikutsertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Perangkat Desa
19. Memberikan sosialisasi bagi Perangkat Desa terkait adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan
20. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa

Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan memfasilitasi , membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, PNPM dan sumber dana lainnya
2. Memfasilitasi , membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan, dan peternakan
3. Penertiban organisasi Gapoktan di masing-masing desa
4. Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi
5. Memfasilitasi , membina dan memantau kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah
6. Monitoring pelaksanaan musrenbarg desa dan melaksanakan musrenbarg kecamatan
7. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan
8. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat
9. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan ,ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Gumelar
10. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta kesehatan
11. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Kegiatan Posyandu
12. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Gerakan Keluarga Sejahtera
13. Pembinaan kelompok simpan pinjam Program PNPM

Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan

1. Monitoring penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin)
2. Monitoroing Pelaksanaan BPNT
3. Monitoring penyaluran Jamkesgaskin
4. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga keagamaan
5. Memfasilitasi pembangunan tempat-tempat ibadah
6. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan
7. Pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait dengan kegiatan Olahraga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana
8. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya , ketenagakerjaan dan kemasyarakatan
9. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup serta pentingnya efektifitas dan edisiensi
10. Membantu penanganan masalah sosial dan bencana alam

Berikut adalah pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Gumelar

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gumelar Provinsi/Kabupaten/Kota Banyumas

NO	Indikator	SPM/st an dar nasion al	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016 (thn n-2)	Tahun 2017 (thn n-1)	Tahun 2018 (tnn n)	Tahun 2019 (thn n+1)	Tahun 2016 (thn n-2)	Tahun 2017 (thn n-1)	Tahun 2018 (tnn n)	Tahun 2019 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	90	90	80	80	80	82	73	74	75	82	
2	Prosentase Lemabag Kemasyarakatan yang aktif	100	100	100	100	100	100	86	88	90	92	
3.	Prosentase jumlah desa/kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan	100	100	100	100	100	100	86	87	90	92	
4.	Prosentase data masyarakat miskin dari basis data terpadu penanganan fakir miskin di Kecamatan yang akurat	100	100	100	100	100	100	86	87	90	92	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Gumelar

1. Permasalahan

Permasalahan Kecamatan Gumelar dalam melakukan tupoksinya adalah masih lemahnya atau belum optimalnya pola Koordinasi fasilitasi. Motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan , Ekonomi Pembangunan , Kesejahteraan Masyarakat , Aset Pertahanan dan Keamanan wilayah yang disebabkan :

- Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum memadai
- Etos kerja yang belum terbina secara optimal
- Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan
- Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi Perkantoran

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Gumelar secara rinci dapat di jelaskan sebagai berikut:

a. Bidang Pemerintahan :

1) Urusan Kependudukan memiliki permasalahan :

- Masih banyak Penduduk wajib kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang belum terdata dengan baik
- Bahwa masih banyak warga yang tidak langsung merubah perbaikan data kependudukan
- Masih tingginya prosentase warga yang belum mempunyai Akta Lahir sehingga menyulitkan warga sendiri ketika melamar pekerjaan Formal

Adapun upaya-upaya yang telah di lakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di setiap kesempatan selalu melaksanakan sosialisasi ke desa, hal ini tentunya sangat berdampak positif bagi masyarakat , dengan harapan 100 % Warga Desa sudah mempunyai Kartu Keluarga sebagai identitas formal.

2) Peraturan Desa , permasalahan :

Dalam pembuatan Peraturan Desa masih banyak terjadi kendala antara lain masih kurangnya pemahaman Pemerintahan Desa terhadap pentingnya Produk Hukum bagi pemerintah Desa , sehingga terkesan setiap pembuatan peraturan Desa tidak berkwalitas baik dari segi redaksi tata bahasa , nilai estetika, filosofi hukum

Upaya-upaya yang telah di lakukan adalah memberikan Sosialisasi kepada Pemerintah Desa tentang pedoman pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa secara rutin

3) Alokasi Dana Desa, permasalahan :

Redaksi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa untuk seluruh Desa banyak terjadi kesalahan

Upaya yang telah dilakukan mengenai redaksi penyusunan laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa untuk seluruh desa masih perlu penyempurnaan dan koreksi dari Bagian Tata Pemerintahan Desa , namun secara umum pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Gumelar tidak ada permasalahan.

4) Pembinaan Perangkat, permasalahan :

- Masih perlu peningkatan sumber daya manusia perangkat desa serta sarana komputer yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat efektif dan efisien
- Sistem administrasi produk hukum , kependudukan dan urusan pemerintahan kurang tertata.

Upaya yang telah dilakukan :

- Perlu pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perangkat pemerintah desa
- Pengalokasian anggaran desa untuk belanja kebutuhan sarana dan prasarana administrasi
- Perlu pembinaan secara berkesinambungan tentang produk hukum yang membuat peraturan desa dengan Narasumber dari Pemerintah Kabupaten dan praktisi Hukum

b. Bidang Pertanahan Dan Aset

- Permasalahan Pajak Bumi dan Bangunan yang kami hadapi di wilayah tidak terlalu signifikan hanya waktu yang di berikan untuk Pembetulan Surat Tanda Terima Setoran sangat pendek
- Adanya surat pemberitahuan pajak terhitung ganda
- Wajib pajak tidak bertempat tinggal di Desa tersebut (luar kota) sehingga sulit di temui oleh petugas pemungut
- Turunnya surat tanda terima setoran dari Bank Jateng masih terlalu lama sehingga para pembayar pajak bumi dan bangunan dilakukan secara kolektif

Upaya yang telah dilakukan :

- Sebelum Surat Tanda Terima Setoran turun kami mengadakan rapat persiapan penanganan masalah pajak bumi dan bangunan dengan mengundang Kepala Desa sewilayah Kecamatan Gumelar . Serta pembentukan Petugas Khusus Kecamatan untuk tingkat Desa dibentuk pula Petugas Khusus dan Petugas Pemungut. Dengan terbentuknya petugas-petugas tersebut akan mempunyai tanggung jawab masing-masing rayon dan wilayah.

- Petugas khusus kecamatan bertugas mengkoordinir Petugas Rayonisasi dan Petugas Khusus Desa dalam hal penerimaan pemasukan pajak bumi dan bangunan , membantu ikut menyelesaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung bermasalah dan 2 minggu sekali mengadakan Evaluasi penerimaan pajak bumi dan bangunan. Petugas khusus desa bertugas mengkoordinir penerimaan pemasukan pajak bumi dan bangunan dari Petugas Pemungut, menyelesaikan surat pemberitahuan pajak terhitung bermasalah dan ikut membantu petugas pemungut menangani Wajib Pajak yang bertempat tinggal diluar wilayah (luar kota)
- Untuk memaksimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan kami mengadakan Publikasi arti pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan ke Desa-desa setelah surat Pemberitahuan Pajak Terhitung turun dan sebelum jatuh tempo pelunasannya
- Dengan demikian permasalahan yang ada dapat di atasi serta penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat di maksimalkan serta sesuai pelunasannya sebelum jatuh tempo
- Untuk surat tanda terima setoran yang masih belum turun dari Bank Jateng kita upayakan dengan koordinasi ke Bank Jateng melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas

c. Bidang Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan :

- Bidang Ekonomi Pembangunan pada umumnya di Kecamatan Gumelar berjalan dengan baik, tetapi kendala yang di hadapi di bidang pengoperasian masih belum memahami tentang Administrasi
- Di bidang Pemberdayaan Perempuan kurang adanya keterlibatan kelompok perempuan yang terdidik terlatih dan terampil dalam berbagai sector
- Pembangunan di kecamatan Gumelar pada umumnya berjalan baik terutama cukup baik terutama bidang kemitraan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan

Upaya yang telah di lakukan

- Bidang Ekonomi Pembangunan diadakannya pelatihan kepada pengurus koperasi dalam kurun waktu tertentu
- Sering kali di adakan Sosialisasi bidang pembangunan sehingga bisa memaksimalkan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut
- Terus menerus di adakan pelatihan lewat wadah Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga , Koperasi Wanita , dan Jama'ah Tahlii Perempuan

d. Bidang Kesejahteraan Sosial Dan kepemudaan :

- Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan
- Banyaknya pernikahan usia muda (20 tahun ke bawah)
- Sosialisasi kesehatan reproduksi keluarga masih dirasa kurang
- Kurangnya kesadaran pemuda dalam perannya berpartisipasi ikut dalam upaya mensukseskan pembangunan yang ada di wilayah mereka
- Peranan pemuda dalam berolah raga masih kecil, terbukti masih minimnya klub-klub olahraga yang ada

- Meningkatkan peran institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh kesehatan dan dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta momentum dalam memecahkan masalah
- Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Kepala Desa untuk memaksimalkan peran kader dan institusi Masyarakat dalam peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaian target Keluarga Berencana
- Adanya pengajuan program pembangunan melalui proposal yang beragam dan cukup banyak untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan Camat, baik berupa pengajuan proposal pembangunan fisik maupun non fisik yang bersifat untuk kepentingan Masyarakat
- Telah di cukupinya kelengkapan administrasi dan inventarisasi proyek
- Meningkatkan peran Institusi Kepemudaan melalui berbagai lembaga baik Karang Taruna , klub-klub Olah raga yang ada untuk dilibatkan dalam setiap kegiatan atau acara-acara peringatan hari besar nasional atau acara-acara yang di buat yang di prakarsai oleh Pemuda
- Mendukung dan mendorong tumbuh kembangnya kreasi pemuda baik melalui Kesenian Tradisional, Orkes Melayu atau Grup Band , serta tari-tarian dengan memberi motivasi dan arahan yang membangun
- Meningkatkan tali silaturahmi kepada para pemuka Agama untuk mendorong tumbuhnya rasa persatuan dan kesatuan dengan mendatangi setiap undangan dan kegiatan yang ada
- Mempermudah dan membantu percepatan Pembangunan tempat ibadah dengan tetap mempertimbangkan aspek kelayakan dengan pertimbangan koordinasi dengan lembaga terkait

e. Bidang Trantibum, sektor Keamanan Lingkungan Masyarakat :

- Masih perlu ditingkatkannya kesadaran Masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggung jawab bersama
- Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap antisipasi bencana di masing-masing lingkungan
- Masih tingginya penggunaan Miras
- Kurangnya kesadaran hukum (hak dan kewajiban) yang harus di penuhi masyarakat dan pelaku usaha

Upaya yang telah di lakukan :

- Mengadakan rapat pembinaan Linmas Desa dan Koordinasi satgas yang lain
- Mengadakan Rapat Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Penanggulangan Bencana unit Operasional Penanggulangan Bencana di Seluruh Desa se Kecamatan Gumelar
- Mengadakan Sosialisasi secara berkala berkaitan dengan Ketentraman Ketertiban dan Keamanan Wilayah
- Meningkatkan kesadaran hukum tentang hak dan Kewajiban yang harus di penuhi masyarakat dan pelaku usaha

2. Peluang

- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah serta pelayanan public
- Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan tupoksi Kecamatan
- Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan

3. Tantangan

- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas Pemerintahan
- Belum optimalnya koordinasi dengan dan antar Dinas Tekhnis terkait
- Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah

2.4 Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021

Kabupaten Banyumas

Nama SKPD : Kecamatan Gumelar

Lembar.....dari.....

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting / Sumber Dana
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Kecamatan Gumelar			627.000.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Gumelar			627.000.000	APBD
			Persentase realisasi keungan program	100 %				Persentase realisasi keungan program	100 %		
			Persentasi realisasi fisik program	100 %				Persentasi realisasi fisik program	100 %		
	1. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	Kecamatan Gumelar	Jasa publikasi yang di bayar	12 bulan	100.000.000	1. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	Kecamatan Gumelar	Jasa publikasi yang di bayar	12 bulan	100.000.000	APBD
	2. Kegiatan Penyediaan bahan Logistik kantor Perangkat Daerah	Kecamatan Gumelar	Jumlah Bahan perlengkapan kerja tersedia	12 bulan	80.000.000	2. Kegiatan Penyediaan bahan Logistikkantor Perangkat Daerah	Kecamatan Gumelar	Jumlah Bahan perlengkapan kerja tersedia	12 bulan	80.000.000	APBD
	3. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dan Perjalanan Dinas perangkat daerah	Kecamatan Gumelar	Kegiatanrapat koordinasi/Fasilitasi Pertemuan yang dilaksanakan	12 bulan	125.000.000	3. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dan Perjalanan Dinas perangkat daerah	Kecamatan Gumelar	Kegiatanrapat koordinasi/Fasilitasi Pertemuan yang dilaksanakan	450 kali	87.029.000	APBD
	4. Kegiatan Penyediaan Tenaga Administrasi, Keamanan, pengemudi dan,kebersihan Perangkat daerah	Kecamatan Gumelar	Tenaga Administrasi,Keamanan,Peng emudi, dan kebersihan Perangkat daerah yang dibayarkan honorinya	6 orang	126.200.000	4. Kegiatan Penyediaan Tenaga Administrasi, Keamanan, pengemudi dan,kebersihan Perangkat daerah	Kecamatan Gumelar	Tenaga Administrasi,Keamanan,Peng emudi,dan kebersihan Perangkat daerah yang dibayarkan honorinya	10 orang	126.000.000	APBD
	5. Kegiatan Pengendalian dan penatausahaan Keuangan Daerah perangkat daerah	Kecamatan Gumelar	Honor Pengelola Keuangan daerah Perangkat ndaerah yang dibayarkan	12 bulan	25.000.000	5. Kegiatan Pengendalian dan penatausahaan Keuangan Daerah perangkat daerah	Kecamatan Gumelar	Honor Pengelola Keuangan daerah Perangkat ndaerah yang dibayarkan	12 bulan	25.000.000	APBD
	6. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat daerah	Kecamatan Gumelar	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor perangkat Daerah yang tersedia	19 unit	56.000.000	6. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat daerah	Kecamatan Gumelar	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor perangkat Daerah yang tersedia	19 unit	56.000.000	APBD
	7. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Perangkat Daerah	Kecamatan Gumelar	Jumlah Gedung Pemerintah dalam kondisi baik	2 unit	25.000.000	7. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Perangkat Daerah	Kecamatan Gumelar	Jumlah Gedung Pemerintah dalam kondisi baik	3 unit	25.000.000	APBD
	8. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional perangkat daerah	Kecamatan Gumelar	Jumlah kendaraan Bermotor Roda 2 dan 4	9 Unit	70.000.000	8. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional perangkat daerah	Kecamatan Gumelar	Jumlah kendaraan bermotor Roda 2 dan 4	9 unit	70.000.000	APBD

	9. Kegiatan Pemeliharaan dan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Kecamatan Gumelar	Jumlah peralatan dan perlengkapan perangkat daerah kantor dalam kondisi baik	15 unit	20.000.000	9. Kegiatan Pemeliharaan dan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Kecamatan Gumelar	Jumlah peralatan dan perlengkapan perangkat daerah kantor dalam kondisi baik	15 unit	20.000.000	APBD
II	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Gumelar			245.000.000		Kecamatan Gumelar			245.000.000	
			Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	100 %			Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	100 %			
			Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	100 %			Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	100 %			
			Persentase pembayaran PBB di kecamatan	100 %			Persentase pembayaran PBB di kecamatan	100 %			
			Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	100 %			Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	100 %			
			Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	100 %			Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	100 %			
			Persentase LINMAS terbina								
II.	1. Fasilitas penyelenggaraan pelayanan kecamatan	Kecamatan Gumelar	Jumlah PATEN yang terlayani	12 bulan	140.000.000	1. Fasilitas penyelenggaraan pelayanan kecamatan	Kecamatan Gumelar	Jumlah PATEN yang terlayani	18.100	140.000.000	APBD
	2. Fasilitas Perencanaan dan Pembangunan Desa/Kelurahan	Kecamatan Gumelar			15.000.000	2. Fasilitas Perencanaan dan Pembangunan Desa/Kelurahan	Kecamatan Gumelar			15.000.000	APBD
			Frekuensi pelaksanaan Monev terkait perencanaan pemnbangunan desa	2 keg			Frekuensi pelaksanaan Monev terkait perencanaan pemnbangunan desa	2 keg			
			Pelaksanaan musrenbang di desa dan kecamatan	14 keg			Pelaksanaan musrenbang di desa dan kecamatan	14 keg			
	3. Fasilitas intensifikasi PBB	Kecamatan Gumelar	Persentase PBB yang dapat terbayar	100 %	15.000.000	3. Fasilitas intensifikasi PBB	Kecamatan Gumelar	Persentase PBB yang dapat terbayar	100 %	15.000.000	APBD
	4. Fasilitas pemberdayaan Masyarakat dan tim Penanggulangan kemiskinan kecamatan	Kecamatan Gumelar	Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan	12 Keg	40.000.000	4. Fasilitas pemberdayaan Masyarakat dan tim Penanggulangan kemiskinan kecamatan	Kecamatan Gumelar	Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan	12 Keg	40.000.000	APBD
	5. Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban kecamatan	Kecamatan Gumelar			20.000.000	5. Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban kecamatan	Kecamatan Gumelar			20.000.000	APBD
			Jumlah Penanganan gangguan trantibum yang seuai SOP	30 Laporan			Jumlah Penanganan gangguan trantibum yang seuai SOP	30 Laporan			
			Pelaksanaan rakor linmas	8 Keg			Pelaksanaan rakor linmas	8 Keg			
			Jumlah Pembinaan kepada linmas	6 Keg			Jumlah Pembinaan kepada linmas	6 Keg			
	6. Fasilitas pembinaan dan Pengawasan APBdes kecamatan Gumelar	Kecamatan Gumelar			15.000.000	6. Fasilitas pembinaan dan Pengawasan APBdes kecamatan Gumelar	Kecamatan Gumelar			15.000.000	APBD

			Frekuensi rakor Pembinaan dan pengawasan APBdDes	4 Keg				Frekuensi rakor Pembinaan dan pengawasan APBdDes	4 Keg		
			Frekuensi Monev Pembinaan dan pengawasan APBDes	4 Keg				Frekuensi Monev Pembinaan dan pengawasan APBDes	4 Keg		
III	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Kecamatan Gumelar			7.500.000	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Kecamatan Gumelar			7.500.000	
			Prosentase Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	100 %				Prosentase Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	100 %		
			Prosentase Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	100 %				Prosentase Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	100 %		
	Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Gumelar	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang tersusun	5 dok	7.500.000	Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Gumelar	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang tersusun	5 dok	7.500.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gumelar Tahun 2021 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Gumelar tahun 2019 ini dsusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 287 ayat 2 dalam hal penyusunan RKPD yang belum memiliki RPJMD menyatakan : “ Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas . Penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arahan kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD Provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten.kota dan Provinsi, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2017 , agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, tolak ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial) , yang menempatkan indeks pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan

Dalam konteks perencanaan pembangunan , Kecamatan Gumelar Kabupaten banyumas dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan , melayani /memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain dalam era globalisasi, Kecamatan Gumelar dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

a. Visi

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*Clarity of direction*) berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari Visi Kabupaten Banyumas, yaitu sebagai berikut:

“Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”

Visi tersebut mengandung tiga frase, yaitu sebagai berikut :

Visi tersebut mengandung tiga frase, yaitu sebagai berikut :

1. Maju

Secara harfiah, maju berarti berjalan (bergerak) ke muka atau menjadi lebih baik, atau berkembang. Maju dimaknai sebagai sebuah harapan kondisi Kabupaten Banyumas yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, dengan keunggulan tertentu yang membedakan dengan daerah lainnya. Kemajuan akan ditandai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, pemerintahan maupun infrastruktur menuju ke arah yang lebih baik. Perkembangan daerah tersebut akan menjadikan wilayah Kabupaten Banyumas ideal untuk ditinggali dan mampu menjadikan masyarakat bahagia.

2. Adil-Makmur

Adil secara harfiah berarti sama atau tidak memihak, sedangkan makmur berarti banyak hasil atau serba kecukupan (tidak kekurangan). Adil-makmur dimaknai sebagai sebuah harapan untuk menciptakan masyarakat yang serba kecukupan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, baik pada bidang pendidikan, kesehatan, sandang (pakaian), pangan, dan papan (rumah). Kemakmuran ditandai dengan berkurangnya penduduk miskin dan meningkatnya pemerataan pendapatan. Kemakmuran tersebut diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di kota maupun di desa.

3. Mandiri

Secara harfiah mandiri berarti keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Mandiri dimaknai sebagai sebuah harapan agar daerah dan masyarakat mampu mengembangkan potensi dan kekuatan yang

dimiliki untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan mengurangi ketergantungan dengan daerah lain. Kemandirian didorong dengan mengembangkan pertanian sehingga Kabupaten Banyumas mampu menjadi Pelopor Kedaulatan Pangan di Jawa Tengah, serta mengembangkan potensi lokal untuk pengembangan industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

b. Misi

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan kedalam delapan Misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida, yaitu:

1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik

Misi ini mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat dan profesional, dan lebih mendekatkan layanan kepada pengguna layanan, didukung dengan inovasi dan teknologi informasi, sehingga mampu memberikan kepuasan masyarakat yang tinggi. Selain itu melalui misi ini dilaksanakan reformasi birokrasi dapat berjalan efektif, sehingga adanya keterbukaan informasi publik, transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah, dan didukung dengan aparatur sipil negara yang kompeten dan profesional.

2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan

Misi ini mengarah pada peningkatan pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan sehingga menjadikan tercipta masyarakat Banyumas yang berkualitas dan sehat; serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan pemberdayaan perempuan sehingga pembangunan dapat dirasakan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan

Misi ini mengarah pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, tidak hanya sekedar tumbuh, tetapi memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran.

4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan

Misi ini mengarah pada perwujudan Kabupaten Banyumas sebagai penopang ketersediaan pangan di Provinsi Jawa Tengah dengan menghasilkan padi sebagai sumber pangan utama.

5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan

Misi ini mengarah pada peningkatan iklim investasi dan usaha sehingga mampu mendorong peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyumas, didukung dengan pembangunan kawasan industri dan pengembangan kawasan strategis. Selain itu peningkatan investasi juga diikuti dengan pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, sehingga daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat dipertahankan untuk menunjang kehidupan masyarakat.

6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan

Misi ini mengarah pada peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, baik infrastruktur dasar maupun infrastruktur penunjang terutama jalan, drainase, irigasi, sanitasi, air bersih, perhubungan, maupun penataan kawasan permukiman.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal

Misi ini mengarah pada pengembangan kawasan wisata dan ekonomi kreatif, serta pengembangan industri kecil menengah dan Usaha mikro kecil dan menengah berbasis sumberdaya lokal agar mampu meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Banyumas dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Misi ini mengarah pada aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kepribadian yang baik, dan hidup dalam suasana yang rukun dan damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Banyumas, maka berdasarkan Visi dan Misi tersebut maka kecamatan Gumelar dalam menjalankan Tujuan dan Sasaran Renja adalah dengan misi pertama yaitu *Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat.* Tujuan dan sasaran ini ditetapkan berdasarkan pada Visi, Misi dan faktor – faktor kunci keberhasilan melalui analisis SWOT sebelumnya. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi misi yang ingin dicapai atau dihasilkan pada akhir periode Renstra. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Gumelar yang ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

No	TUJUAN	NO	SASARAN
1	Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan Yang Prima	1	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

3.3 Program dan Kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 selengkapnya sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

c. Administrasi Umum , terdiri dari :

1. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
11. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
12. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan Fasilitasi Perencanaan dan pembangunan Desa/Kelurahan
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

e. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan

D. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

f. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat

g. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada

1. Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

E. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

h. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa

BAB VI
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
SERTA PENDANAAN

4.1 RANCANGAN AWAL RENJA

Rencana Kerja Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas rancangan awal Renja dapat dilihat pada lampiran tabel berikut

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Berdasarkan Permendagri Nomor 90
KECAMATAN GUMELAR
Tahun 2021
Kabupaten Banyumas

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kegiatan/ Indikator Subkegiatan	Sasaran Kegiatan	Rencana Tahun 2021					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana			
						APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total
7.01.0.00.0.00.09.00	KECAMATAN GUMELAR					2.350.000.000	-	-	2.350.000.000
7.01.0.00.0.00.09.01	KECAMATAN GUMELAR					2.825.000.000	-	-	2.350.000.000
7	Unsur Kewilayahan					2.350.000.000	-	-	2.350.000.000
7 01	Kecamatan					2.350.000.000	-	-	2.350.000.000
7 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Persentase realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan 3. Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah			1. 100 % 2. 100 % 3. 100 %	1.505.000.000	-	-	1.505.000.000
7 01 01 2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun			4 Dokumen	5.000.000	-	-	5.000.000
7 01 01 2.01 05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan rapat kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan		Kecamatan Gumelar	4 Kali	5.000.000	-	-	5.000.000
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan	Tersedianya pelayanan Administrasi Keuangan			14 Bulan	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya		Kecamatan Gumelar	11 Orang	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
7 01 01 2.03	Administrasi Umum	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum			12 Bulan	672.500.000	-	-	672.500.000

7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Pembayaran Pajak, PBB dan Pajak kendaraan yang dibayar2. Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar		Kecamatan Gumelar	1. 1 Tahun 2. 12 Bulan	35.000.000	-	-	35.000.000
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1. Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan2. Biaya Sewa Peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayar3. Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorarnya4. Jasa publikasi yang dibayar		Kecamatan Gumelar	1. 12 Bulan 2. 30 Unit 3. 12 Bulan 4. 12 Kali	216.000.000	-	-	216.000.000
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	1. Alat Tulis Kantor yang tersedia2. perangko, materai dan benda pos lainnya yang tersedia		Kecamatan Gumelar	1. 30 Jenis 2. 625 Buah	35.000.000	-	-	35.000.000
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	cetak dan penggandaan yang tersedia		Kecamatan Gumelar	800 eksemplar	15.000.000	-	-	15.000.000
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik yang tersedia		Kecamatan Gumelar	2 Jenis	35.000.000	-	-	35.000.000
7	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bahan perlengkapan kerja tersedia		Kecamatan Gumelar	12 Bulan	67.420.000	-	-	67.420.000
7	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga yang tersedia		Kecamatan Gumelar	8 Jenis	20.000.000	-	-	20.000.000
7	01	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor yang tersedia		Kecamatan Gumelar	7 Jenis	50.000.000	-	-	50.000.000
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan Minum harian Pegawai, Rapat dan jamuan tamu yang tersedia		Kecamatan Gumelar	12 Bulan	65.000.000	-	-	65.000.000
7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Perjalanan dinas untuk rapat, Koordinasi dan konsultasi		Kecamatan Gumelar	12 Bulan	100.000.000	-	-	100.000.000

7	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan kantor perangkat daerah yang tersedia		Kecamatan Gumelar	5 Unit	50.000.000	-	-	50.000.000
7	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan kantor perangkat daerah yang tersedia		Kecamatan Gumelar	5 Unit	60.000.000	-	-	60.000.000
7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	gedung pemerintah dalam kondisi baik		Kecamatan Gumelar	2 Unit	15.000.000	-	-	18.500.000
7	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik		Kecamatan Gumelar	3 Unit	12.000.000	-	-	30.000.000
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1. Persentase pembayaran PBB di kecamatan 2. Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik			1. 100 % 2. 100 %	16.280.000	-	-	50.000.000
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1. Jumlah Jenis Pelayanan PATEN 2. Persentase desa/kelurahan yang memenuhi target Pembayaran PBB			1. 7 Jenis 2. 100 %	5.000.000	-	-	50.000.000
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	pemohon PATEN yang terlayani		Kecamatan Gumelar	100%	40.000.000	-	-	40.000.000
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Persentase PBB yang dapat terbayar			93%	10.000.000	-	-	10.000.000
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1. Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif 2. Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik			1.94% 2.100%	60.000.000	-	-	60.000.000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1. Persentase Kehadiran perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbang di desa/kelurahan 2. Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terfasilitasi			1. 100 % 2. 100 %	60.000.000	-	-	60.000.000

7	01	03	2.01	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	1. Pelaksanaan Musrenbang di desa / kelurahan dan kecamatan 2. Frekuensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan desa / kelurahan 3. kegiatan perencanaan dan pembangunan desa / kelurahan yang terfasilitasi		Kecamatan Gumelar	1. 100 % 2. 4 Kali 3. 1 Kali	20.000.000	-	-	20.000.000
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan		Kecamatan Gumelar	45 Kali	40.000.000	-	-	40.000.000
7	01	04			Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas terbina			100%	22.500.000	-	-	22.500.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			100%	14.500.000	-	-	14.500.000
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1. Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban kecamatan yang tertangani 2. penanganan gangguan trantibum yang dilaksanakan sesuai SOP		Kecamatan Gumelar	1. 100 % 2. 100 %	7.000.000	-	-	7.000.000
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	pelaksanaan rakor Linmas		Kecamatan Gumelar	8 Keg	7.500.000	-	-	7.500.000
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada			100%	8.000.000	-	-	8.000.000

7	01	04	2.02	01	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	pembinaan kepada linmas		Kecamatan Gumelar	6 Keg	8.000.000	-	-	8.000.000
7	01	06			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK			100%	15.000.000	-	-	15.000.000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa yang terfasilitasi			100%	15.000.000	-	-	15.000.000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	1. kegiatan pembinaan serta pengawasan pengelolaan Dana Desa / Dana Kelurahan yang terfasilitasi2. Frekfensi pembinaan dan pengawasan APBDes3. Frekuensi Monitoring dan evaluasi Pengelolaan APBDes4. Prosentase Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan APBDes dan monitoring evaluasi pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa		Kecamatan Gumelar	1. 1 Kali 2. 12 Kali 3. 12 Kali 4. 100 %	15.000.000	-	-	15.000.000
TOTAL PAGU													

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Berdasarkan Permendagri Nomor 13

KECAMATAN GUMELAR

Tahun 2021

Kabupaten Banyumas

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Indikator Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Rencana Tahun 2021							
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana			Total		
						APBD Kab	APBD Prov	APBN			
4	Penunjang Urusan Pemerintahan						-	-			
4	Administrasi Pemerintahan					896.500.000	-	-	896.500.000		
4	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	1. Persentase realisasi keuangan program 2. Persentase realisasi fisik program			1. 100 % 2. 100 %	6445.000.000	-	-	644.000.000		
4	1	1	1	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	1. Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar 2. Biaya Sewa Peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayar 3. Jasa publikasi yang dibayar 4. Pembayaran Pajak, PBB dan Pajak kendaraan yang dibayar	Kecamatan Gumelar	1. 12 Bulan 2. 30 Unit 3. 12 Kali 4. 1 Tahun	80.000.000	-	-	80.000.000
4	1	1	2	Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah	1. bahan perlengkapan kerja tersedia 2. Alat Tulis Kantor yang tersedia 3. peranko, materai dan benda pos lainnya yang tersedia 4. cetak dan penggandaan yang tersedia 5. alat listrik dan elektronik yang tersedia 6. Makan Minum harian Pegawai, Rapat dan jamuan tamu yang tersedia	Kecamatan Gumelar	1. 12 Bulan 2. 30 Jenis 3. 600 Buah 4. 800 eksemplar 5. 2 Jenis 6. 12 Bulan	80.000.000	-	-	80.000.000
4	1	1	4	Penyediaan Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah	1. Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya 2. Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya	Kecamatan Gumelar	6 Orang. 12 Bulan	144.000.000	-	-	144.000.000

4	1	1	5	Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah	1. Perjalanan dinas untuk rapat, Koordinasi dan konsultasi 2. Perjalanan dinas untuk rapat, Koordinasi dan konsultasi		Kecamatan Gumelar	1. 210 Bulan 2. 12 Bulan	135.000.000	-	-	135.000.000
4	1	1	6	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah yang tersedia		Kecamatan Gumelar	5 Paket	50.000.000	-	-	50.000.000
4	1	1	7	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik		Kecamatan Gumelar	12 Bulan	20.000.000	-	-	20.000.000
4	1	1	8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah	gedung pemerintah dalam kondisi baik		Kecamatan Gumelar	12 Bulan	25.000.000	-	-	25.000.000
4	1	1	9	Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional kendaraan Perangkat Daerah	1. kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik 2. kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik		Kecamatan Gumelar	1. 2 Unit 2. 6 Unit	80.000.000	-	-	80.000.000
4	1	1	10	Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah Perangkat Daerah	Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan		Kecamatan Gumelar	12 Bulan	30.000.000	-	-	30.000.000
4	1	6		Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1. Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah 2. Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah			1. 100 % 2. 100 %	7.500.000	-	-	7.500.000
4	1	6	1	Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun 2. Kegiatan rapat kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan		Kecamatan Gumelar	1. 5 Dokumen 2. 4 Kali	7.500.000	-	-	7.500.000

4	1	43		Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan	1. Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik 2. Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik 3. Persentase pembayaran PBB di kecamatan 4. Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK5. 5. Persentase Linmas terbina			1. 100 % 2. 100 % 3. 100 % 4. 100 % 5. 100 %	245.000.000	-	-	245.000.000
4	1	43	1	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	1. pemohon PATEN yang terlayani 2. penyelenggaraan pelayanan kecamatan yang terfasilitasi		Kecamatan Gumelar	1. 100 % 2. 100 %	140.000.000	-	-	140.000.000
4	1	43	2	Fasilitasi Perencanaan dan Pembangunan Desa / Kelurahan	1. Frekuensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan desa / kelurahan 2. Pelaksanaan Musrenbang di desa / kelurahan dan kecamatan 3. kegiatan perencanaan dan pembangunan desa / kelurahan yang terfasilitasi 4. kegiatan pembinaan serta pengawasan pengelolaan Dana Desa / Dana Kelurahan yang terfasilitasi		Kecamatan Gumelar	1. 4 Kali 2. 100 % 3. 1 Kali 4. 1 Kali	15.000.000	-	-	15.000.000
4	1	43	3	Fasilitasi Intensifikasi PBB	Persentase PBB yang dapat terbayar		Kecamatan Gumelar	100%	15.000.000	-	-	15.000.000

		4143	4	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Tim Penganggulangan Kemiskinan Kecamatan	Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan		Kecamatan Gumelar	10 Kali	40.000.000	-	-	40.000.000
4	1	43	5	Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	1. penanganan gangguan trantibum yang dilaksanakan sesuai SOP2. pelaksanaan rakor Linmas3. pembinaan kepada linmas4. Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban kecamatan yang tertangani		Kecamatan Gumelar	1. 100 %2. 8 Keg3. 6 Keg4. 100 %	20.000.000	-	-	20.000.000
4	1	43	76	Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan APBDes Kecamatan Gumelar	1. Frekuensi Monitoring dan evaluasi Pengelolaan APBDes2. Prosentase Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan APBDes dan monitoring evaluasi pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa3. Frekfensi pembinaan dan pengawasan APBDes		Kecamatan Gumelar	1. 4 Kali2. 100 %3. 12 Kali	15.000.000	-	-	15.000.000
TOTAL Anggaran									825.000.000	-	-	825.000.000

BAB V PENUTUP

Dengan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Tahun 2021 Kecamatan Gumelar ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi para pelaksana kegiatan di Kecamatan Gumelar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Untuk itu diperlukan partisipasi dan dukungan pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan terutama masyarakat, Lembaga Desa, Perangkat Desa maupun pihak yang lain yang membantu terwujudnya pelaksanaan Pemerintahan yang baik.

Untuk mendukung dan mensukseskan program dan kegiatan pemerintah Kabupaten di wilayah Kecamatan Gumelar, maka Kecamatan Gumelar menyusun renja SKPD Tahun 2019 yang berdasarkan Renstra SKPD Tahun 2018 –2023.. Untuk mencapai tujuan maka ditentukan bentuk dan konfigurasi program dalam kebijakan dalam Rencana Kerja Tahun 2021 sebagai berikut :

- a. Inventarisasi dan analisa permasalahan hubungan antar umat beragama
- b. Peningkatan Partisipasi seluruh umat beragama dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- c. Peningkatan SDM pengelola pelayanan di sekretariat kecamatan dan sekretariat desa
- d. Pengadaan dan penyesuaian sarana dan prasarana pelayanan sesuai dengan tingkat kebutuhan
- e. Peningkatan kemampuan teknis dan manajerial pengelolaan lembaga usaha ekonomi desa
- f. Peningkatan kerjasama dan koordinasi penanganan masalah
- g. Peningkatan penguasaan dan pemahaman nilai-nilai budaya banyumasan
- h. Peningkatan pemahaman pentingnya berwawasan kebangsaan
- i. Peningkatan kualitas pelaksanaan demokratisasi pada penyelenggaraan pemerintahan desa
- j. Peningkatan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat di tingkat desa maupun tingkat kecamatan
- k. Peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparat pemerintahan desa
- l. Peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparat pemerintahan kecamatan
- m. Peningkatan kemandirian pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan
- n. Peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum bagi aparat pemerintahan desa dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
- o. Peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan program kerja dan anggaran pemerintahan desa

Sebagai sebuah dokumen perencanaan Renja ini dijadikan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan . Dengan evaluasi ini dapat ditentukan strategi untuk pengembangan pelayanan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di masa mendatang sehingga tujuan yang telah dicapai.



Gumelar, 30 Desember 2020

